

Pengaruh SPI, SIA, dan Pengawasan Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah: Perspektif Pemangku Kepentingan

Fitria Akibun¹, Juwita Pratiwi Biki², Fellia Mariana Timbert³, Fidya Hardiyanti Latala⁴
Program Studi D4 Manajemen Keuangan Sektor Publik¹, Program Studi Ilmu Administrasi Negara^{2,3,4}
Universitas Bina Taruna Gorontalo
fitria.unbita@gmail.com.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaruh Sistem Pengendalian Intern (SPI), Sistem Informasi Akuntansi (SIA), dan Pengawasan Keuangan terhadap kualitas laporan keuangan daerah dari perspektif pemangku kepentingan. Penelitian dilakukan di Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, yang secara purposif dipilih karena masih menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap 43 informan yang terdiri dari pejabat pengelola keuangan, auditor internal, dan pihak terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPI memiliki pengaruh signifikan dalam menjaga integritas dan keandalan laporan keuangan, meskipun penerapannya masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan kurangnya pelatihan teknis. Sementara itu, SIA belum menunjukkan kontribusi yang optimal terhadap kualitas laporan keuangan akibat kendala teknis dan lemahnya literasi digital. Pengawasan keuangan ditemukan memiliki dampak positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaporan, tetapi masih dibutuhkan penguatan dalam bentuk komunikasi dan tindak lanjut hasil audit. Penelitian ini merekomendasikan strategi perbaikan dalam bentuk peningkatan kapasitas SDM, modernisasi sistem informasi akuntansi, dan pembentukan forum komunikasi antara auditor dan pejabat daerah. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel di tingkat daerah.

Keywords: Sistem Pengendalian Intern, Sistem Informasi Akuntansi, Pengawasan Keuangan, Laporan Keuangan Daerah, Kualitas Pelaporan

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of Internal Control Systems (ICS), Accounting Information Systems (AIS), and Financial Supervision on the quality of local government financial reports from the perspective of key stakeholders. Conducted in Kota Barat Subdistrict, Gorontalo City—which was purposively selected due to its consistent "Qualified Opinion" (WDP) status from the Audit Board of Indonesia (BPK)—the study used a descriptive qualitative approach. Data were gathered through in-depth interviews with 43 informants, including financial managers, internal auditors, and relevant officials. Findings indicate that ICS significantly contributes to the reliability and integrity of financial reports. However, its implementation is hindered by limited human resource capacity and lack of technical training. On the other hand, AIS has not yet shown a substantial impact due to infrastructural constraints and low digital literacy. Financial supervision plays a positive role in enhancing transparency and accountability, although gaps in feedback and follow-up mechanisms remain a concern. The study recommends improvement strategies such as strengthening human resource competencies, modernizing accounting information systems, and establishing communication forums between auditors and local officials. These measures are expected to contribute to more accountable and transparent local financial governance.

Keywords: Internal Control System, Accounting Information System, Financial Supervision, Local Financial Report, Report Quality

PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan instrumen yang sangat penting dalam tata kelola organisasi, baik di sektor swasta maupun sektor publik. Keberadaan laporan keuangan

berperan sebagai cerminan dari kondisi keuangan dan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tidak hanya relevan bagi kalangan internal organisasi, tetapi juga bagi pihak eksternal seperti investor, auditor, kreditur, hingga masyarakat umum. (Pura & Saat, 2013) menyatakan bahwa pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap organisasi sangat bergantung pada keandalan dan ketepatan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, karena dari informasi tersebut berbagai kebijakan dan langkah ke depan dapat disusun secara rasional dan objektif (Akibun, Lestari, et al., 2024).

Dalam sektor publik, laporan keuangan memiliki dimensi yang lebih kompleks karena menyangkut dana publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Laporan keuangan dalam hal ini tidak semata-mata menjadi sarana pencatatan, tetapi juga merupakan bentuk pertanggungjawaban moral dan administratif dari pemerintah kepada rakyatnya. Pemerintah sebagai entitas yang mengelola dana publik memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan yang transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana dikemukakan oleh Amin & Anwar, (2020), laporan keuangan pemerintah menjadi instrumen utama dalam menunjukkan tanggung jawab fiskal atas penggunaan sumber daya negara. Artinya, laporan keuangan tidak hanya berfungsi untuk mencatat pengeluaran dan pendapatan, tetapi juga menggambarkan bagaimana pemerintah menjalankan mandat rakyat dalam pengelolaan anggaran (Akibun et al., 2025).

Namun, dalam praktiknya tidak semua entitas pemerintah daerah mampu menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Salah satu contoh nyata adalah Pemerintah Kecamatan Kota Barat di Kota Gorontalo, yang hingga kini masih menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana dilaporkan oleh (BPK RI, 2019). Opini WDP ini mencerminkan bahwa masih terdapat kelemahan signifikan dalam penyusunan laporan keuangan, baik dari sisi kesesuaian dengan standar akuntansi maupun dari sisi penyajian informasi yang belum mencerminkan kondisi sebenarnya (Akibun et al., 2024). Opini semacam ini memberikan sinyal negatif terhadap kualitas pengelolaan keuangan dan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan daerah.

Fenomena semacam ini sebenarnya bukanlah kasus yang berdiri sendiri. Berdasarkan data dari (BPK RI, 2019), dari total 397 laporan keuangan pemerintah daerah yang diaudit, ditemukan sebanyak 3.094 kasus yang menunjukkan adanya penyimpangan, kesalahan pencatatan, hingga ketidakpatuhan terhadap regulasi akuntansi yang berlaku. Angka ini menunjukkan bahwa permasalahan dalam laporan keuangan pemerintah daerah merupakan persoalan sistemik yang membutuhkan perbaikan menyeluruh. Salah satu temuan yang menarik adalah bahwa dua daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk Kecamatan Kota Barat, juga menerima opini WDP pada tahun anggaran yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya kualitas laporan keuangan tidak hanya terjadi pada tingkat kabupaten atau kota, tetapi juga merambah hingga tingkat kecamatan.

Kualitas laporan keuangan pemerintah diatur secara normatif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa laporan keuangan pemerintah yang berkualitas harus

memiliki karakteristik relevansi, keandalan, keterbandingan, dan kemudahan pemahaman. Relevansi mengharuskan informasi dalam laporan keuangan memiliki nilai prediktif dan dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja masa lalu. Keandalan berarti bahwa informasi dalam laporan tersebut harus bebas dari bias dan kesalahan material. Sementara keterbandingan memungkinkan pembandingan antar periode atau antar entitas serupa, dan kemudahan pemahaman menjamin bahwa informasi dapat dipahami oleh pengguna dari berbagai latar belakang.

Mencapai kualitas laporan keuangan yang memenuhi seluruh karakteristik tersebut bukanlah hal yang sederhana. Hal ini membutuhkan sinergi dari berbagai faktor struktural dalam organisasi pemerintah, terutama yang berkaitan dengan sistem pengendalian, sistem informasi keuangan, dan mekanisme pengawasan yang berjalan. Salah satu komponen fundamental dalam sistem tersebut adalah Sistem Pengendalian Intern (SPI). SPI dirancang sebagai kerangka kerja untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien, serta menjamin keandalan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengatur bahwa SPI mencakup lima unsur utama, yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

Dalam literatur akademik, SPI dianggap sebagai tulang punggung keandalan sistem pelaporan keuangan. Tuanakotta, (2013) menjelaskan bahwa penerapan SPI yang baik akan meningkatkan keyakinan pengguna terhadap integritas dan keakuratan laporan keuangan. Penelitian oleh Surastiani & Handayani, (2015), Lestari & Dewi, (2020), serta Agung & Tut, (2018) menunjukkan hasil yang konsisten, bahwa SPI memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Temuan ini mengindikasikan bahwa organisasi yang memiliki sistem pengendalian intern yang kuat akan cenderung menghasilkan laporan yang akurat dan dapat diandalkan. Namun demikian, tidak semua penelitian menghasilkan kesimpulan yang serupa. (Mawuntu et al., 2020), dalam penelitiannya, menemukan bahwa pengawasan internal tidak selalu memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, yang menunjukkan adanya kemungkinan faktor kontekstual dan implementatif yang perlu diperhatikan dalam penerapan SPI.

Selain sistem pengendalian, Sistem Informasi Akuntansi (SIA) juga memegang peranan penting dalam mendukung kualitas laporan keuangan. SIA merupakan sistem yang mengumpulkan, mencatat, mengklasifikasikan, mengolah, dan menyajikan data keuangan untuk digunakan sebagai informasi yang relevan dan akurat. Pura, (2017) menyatakan bahwa penerapan sistem informasi yang baik akan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data keuangan dan mempercepat proses pelaporan. Seiring perkembangan teknologi informasi, SIA tidak hanya menjadi alat bantu pencatatan, melainkan telah berkembang menjadi sistem terintegrasi yang mendukung pelaksanaan fungsi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Di lingkungan pemerintahan, implementasi SIA diatur dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 yang menekankan perlunya sistem informasi berbasis elektronik untuk mendukung pencatatan dan pelaporan keuangan. Penelitian oleh (Antoni & Indonesia, 2014) serta (Lestari & Dewi, 2020) membuktikan bahwa penerapan SIA yang tepat dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan karena mempercepat aliran informasi dan

meningkatkan akurasi data. Namun, tidak semua daerah mampu mengimplementasikan SIA secara maksimal. Penelitian oleh (Yanti & Made, 2020) mengungkapkan bahwa rendahnya pemanfaatan sistem informasi di beberapa pemerintah daerah disebabkan oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kurangnya pelatihan teknis, serta belum meratanya infrastruktur teknologi. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan kualitas laporan keuangan antar daerah dan menunjukkan perlunya strategi penguatan kapasitas kelembagaan secara menyeluruh.

Faktor terakhir yang memiliki pengaruh penting terhadap kualitas laporan keuangan adalah mekanisme pengawasan keuangan. Pengawasan keuangan merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Menurut (Ulum & Sofyani, 2008), pengawasan berfungsi sebagai kontrol yang menjamin bahwa anggaran dijalankan sebagaimana mestinya, penerimaan dan pengeluaran dicatat dengan benar, serta seluruh proses keuangan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam praktiknya, pengawasan dilakukan oleh dua entitas utama, yakni inspektorat daerah (pengawasan internal) dan Badan Pemeriksa Keuangan (pengawasan eksternal).

Beberapa studi menunjukkan bahwa pengawasan yang kuat akan meningkatkan akurasi dan integritas laporan keuangan. Penelitian oleh Rifandi, (2018), Patongai et al., (2018), dan Pujiswara et al., (2014) mengindikasikan bahwa adanya pengawasan keuangan yang intensif dan profesional berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pelaporan. Dalam konteks Kecamatan Kota Barat, lemahnya pengawasan menjadi salah satu penyebab utama tidak tercapainya opini WTP dari BPK. Hal ini dapat terjadi karena terbatasnya sumber daya pengawas, tidak adanya tindak lanjut terhadap temuan audit, atau lemahnya komitmen manajerial terhadap perbaikan sistem.

Lebih dari itu, lemahnya pengawasan tidak hanya berdampak pada kualitas laporan keuangan semata, tetapi juga berpotensi menghambat jalannya desentralisasi fiskal. Ketika dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat tidak dikelola secara transparan dan akuntabel, maka tujuan dari otonomi daerah menjadi terhambat. Oleh karena itu, perbaikan dalam mekanisme pengawasan merupakan langkah strategis yang tidak hanya meningkatkan kualitas laporan keuangan, tetapi juga memperkuat fondasi pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

Dengan memahami pentingnya ketiga faktor di atas, maka penelitian ini menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Pemerintah Kecamatan Kota Barat sebagai bagian dari entitas publik perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penerapan sistem pengendalian intern, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, serta efektivitas pengawasan keuangan yang dijalankan. Dengan analisis yang mendalam terhadap pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap kualitas laporan keuangan, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi penguatan tata kelola keuangan daerah serta mendorong tercapainya opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK di masa yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena dianggap mampu menggambarkan secara mendalam fenomena sosial yang kompleks dan sarat makna,

khususnya terkait opini audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas laporan keuangan Pemerintah Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo (Creswell, 2012). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pengalaman, persepsi, dan pemaknaan subjektif para pelaku pengelolaan keuangan daerah dalam merespons hasil evaluasi dari lembaga auditor negara. Jenis penelitian yang digunakan bersifat eksploratif dan deskriptif, dengan tujuan untuk memahami secara menyeluruh kondisi yang melatarbelakangi opini audit BPK serta faktor-faktor yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan. Pendekatan ini dinilai tepat untuk menggali dinamika sistem pengendalian intern, sistem informasi akuntansi, serta pengawasan keuangan di lingkungan pemerintahan daerah pada level kecamatan.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, yang dipilih secara purposif karena dalam beberapa tahun terakhir wilayah ini masih menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK. Penentuan lokasi ini didasarkan pada fakta empiris yang menunjukkan adanya tantangan nyata dalam penyajian laporan keuangan yang berkualitas (Riduwan, 2010). Kecamatan ini merepresentasikan konteks riil dari kompleksitas pengelolaan keuangan sektor publik pada tingkat lokal, di mana implementasi kebijakan, keterbatasan sumber daya, serta sistem pengawasan menjadi tantangan tersendiri. Peneliti memulai kegiatan penelitian dengan melakukan observasi terhadap kondisi umum, dilanjutkan dengan kajian pustaka untuk memahami konsep-konsep utama dan memperkuat landasan teori. Telaah literatur tersebut mencakup teori akuntabilitas publik, pengendalian intern, sistem informasi akuntansi, serta pengawasan keuangan dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik (Tuanakotta, 2013).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan teknik semi-terstruktur agar informan dapat berbicara leluasa, namun tetap dalam kerangka topik yang telah ditetapkan. Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses penyusunan, pengawasan, dan penilaian laporan keuangan daerah, seperti aparatur bagian keuangan kecamatan, auditor dari inspektorat daerah, serta pihak lain yang memahami konteks audit publik. Pemilihan informan dilakukan secara bertujuan (*purposive*), berdasarkan pertimbangan kompetensi dan pengalaman informan dalam topik yang diteliti. Jumlah informan tidak ditentukan secara pasti sejak awal, tetapi disesuaikan dengan prinsip saturasi data, yaitu ketika wawancara tidak lagi menghasilkan informasi baru yang berarti (Sugiyono, 2016).

Data yang diperoleh dari wawancara dianalisis dengan menggunakan metode analisis tematik, dimulai dari proses transkripsi wawancara, pembacaan mendalam, hingga pengkodean data untuk mengidentifikasi pola-pola makna yang relevan. Kode-kode tersebut kemudian dikelompokkan menjadi tema-tema utama yang merepresentasikan pandangan responden terhadap penerapan sistem pengendalian intern, penggunaan sistem informasi akuntansi, dan efektivitas pengawasan keuangan. Peneliti melakukan proses ini secara iteratif, yakni dengan kembali pada data ketika ditemukan ketidaksesuaian atau kebutuhan untuk klarifikasi. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber informasi dan konfirmasi hasil temuan kepada informan (*member checking*), guna memastikan bahwa interpretasi peneliti tidak menyimpang

dari makna sebenarnya yang disampaikan oleh narasumber (Gunawan, 2022).

Selama proses penelitian, peneliti menjaga prinsip etika penelitian secara ketat. Setiap informan diberikan penjelasan mengenai tujuan dan manfaat penelitian, dan persetujuan mereka diminta secara sukarela. Privasi dan kerahasiaan identitas informan dijamin, dan seluruh informasi yang diperoleh hanya digunakan untuk kepentingan akademik. Peneliti berkomitmen untuk menjaga objektivitas dan tidak memengaruhi jawaban informan demi mempertahankan integritas data. Dengan metode yang dirancang secara komprehensif ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai persepsi dan pengalaman pelaku pengelolaan keuangan di tingkat kecamatan terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan, sekaligus menjadi bahan refleksi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan publik ke depan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengangkat bagaimana pemahaman dan respons para pemangku kepentingan di Kecamatan Kota Barat, Gorontalo, terhadap praktik pengelolaan laporan keuangan dapat mencerminkan kualitas pelaporan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Melalui pendekatan kualitatif, wawancara mendalam dan diskusi kelompok dilakukan dengan 43 pejabat yang terlibat langsung dalam proses pengelolaan keuangan. Penelusuran pengalaman subjektif dari para responden memberikan gambaran menyeluruh mengenai tantangan, pemaknaan, serta peran sistem dan mekanisme yang ada dalam proses pelaporan keuangan.

Salah satu hasil utama yang mencuat dari penelitian ini adalah kesadaran para pejabat terhadap pentingnya pengendalian intern dalam menjamin keandalan informasi keuangan. Mereka memandang bahwa sistem pengendalian intern bukan sekadar formalitas administratif, tetapi merupakan mekanisme vital yang menentukan integritas dari laporan keuangan yang disusun. Dalam praktiknya, sistem ini mampu mencegah potensi kesalahan maupun penyimpangan jika diterapkan dengan konsisten. Namun, implementasi pengendalian intern yang ideal masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa pejabat mengakui bahwa mereka belum sepenuhnya memahami bagaimana sistem ini seharusnya dijalankan, apalagi dalam konteks kompleksitas pelaporan keuangan yang terus berkembang. Keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi kuantitas maupun kompetensi, menjadi faktor penghambat utama. Dalam banyak kasus, kurangnya pelatihan dan penguatan kapasitas pegawai menyebabkan sistem ini hanya berjalan di atas kertas, tanpa pengaruh nyata terhadap kualitas pelaporan.

Sementara itu, ketika membahas keberadaan sistem informasi akuntansi, muncul dinamika yang berbeda. Banyak responden menyatakan bahwa secara teoritis, sistem ini memiliki potensi besar dalam mendukung kecepatan dan ketepatan proses pelaporan. Namun, dalam realitasnya, keberadaan sistem informasi akuntansi belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan. Hal ini disebabkan oleh kombinasi antara lemahnya dukungan infrastruktur teknologi dan keterbatasan kemampuan pengguna sistem. Beberapa pegawai bahkan mengungkapkan bahwa perangkat lunak yang digunakan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan operasional mereka, sehingga pekerjaan justru menjadi lebih lambat karena harus melakukan input data ganda secara manual. Ketidakserasian antara sistem, kebutuhan teknis di lapangan,

dan keterampilan pengguna menciptakan ketidakefisienan yang cukup serius.

Responden juga menyoroti masalah lain, yaitu ketidaksesuaian latar belakang pendidikan pegawai dengan kebutuhan teknis pengelolaan sistem informasi akuntansi. Sebagian besar staf pengelola tidak memiliki dasar pendidikan akuntansi atau teknologi informasi yang memadai, yang menyebabkan proses pengoperasian sistem sering mengalami kendala. Dalam konteks ini, pelatihan teknis tidak hanya penting tetapi menjadi syarat mutlak agar sistem informasi yang ada dapat berjalan sebagaimana mestinya. Di samping itu, responden mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak untuk mengintegrasikan sistem-sistem yang selama ini berdiri sendiri agar mampu menghasilkan data yang terkoordinasi, lengkap, dan mudah diverifikasi oleh auditor.

Aspek pengawasan keuangan juga menjadi temuan penting dalam penelitian ini. Para responden sepakat bahwa fungsi pengawasan memainkan peran kunci dalam membentuk kualitas laporan keuangan. Baik pengawasan internal yang dilakukan oleh inspektorat daerah maupun pengawasan eksternal dari BPK RI, keduanya memiliki pengaruh langsung terhadap ketelitian dan transparansi pelaporan. Pengawasan yang dilakukan secara konsisten dan terstruktur mampu memberikan jaminan bahwa setiap proses yang dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.

Namun, hasil penelitian juga mengungkap adanya kesenjangan komunikasi antara auditor dan pejabat daerah. Banyak responden merasa tidak mendapatkan umpan balik yang konstruktif setelah proses audit dilakukan. Mereka menginginkan bentuk pengawasan yang tidak hanya menekankan pada evaluasi kesalahan, tetapi juga mendorong perbaikan dan pembelajaran. Harapan besar muncul agar auditor dan pihak pengelola keuangan bisa duduk bersama dalam sebuah forum yang terbuka dan dialogis, di mana standar pelaporan dijelaskan secara rinci dan kelemahan-kelemahan dari laporan sebelumnya dibahas dengan solusi yang implementatif.

Kritik lain yang muncul berkaitan dengan peran pemerintah pusat dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah. Para responden menilai bahwa peran ini belum optimal, terutama dalam aspek dukungan teknis dan kebijakan yang responsif terhadap dinamika di daerah. Dalam wawancara, beberapa pejabat menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat dibutuhkan, terutama dalam hal penyediaan sistem yang seragam, pelatihan SDM secara berkelanjutan, serta mekanisme insentif yang mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan. Dukungan semacam ini akan menjadi dasar bagi terciptanya ekosistem pelaporan yang kuat dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa kualitas laporan keuangan daerah tidak bisa dilepaskan dari kekuatan tiga unsur utama: pengendalian intern yang efektif, sistem informasi akuntansi yang terintegrasi dan didukung SDM yang kompeten, serta mekanisme pengawasan yang membimbing dan membina. Ketiga unsur ini saling berkelindan dan tidak bisa berdiri sendiri. Ketidakseimbangan dalam salah satu aspek akan berdampak langsung pada lemahnya kualitas laporan yang dihasilkan.

Dengan demikian, untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan di tingkat daerah, Pemerintah Kota Gorontalo, khususnya di Kecamatan Kota Barat, perlu

melakukan langkah-langkah strategis secara simultan. Penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan yang relevan, pengadaan dan modernisasi sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan, serta penciptaan ruang komunikasi yang terbuka antara auditor dan pelaksana lapangan menjadi langkah yang paling urgen. Penelitian ini juga merekomendasikan agar kebijakan pemerintah pusat lebih berpihak pada peningkatan kapasitas lokal, bukan hanya melalui regulasi, tetapi juga dalam bentuk pendampingan teknis dan anggaran yang memadai.

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa kualitas laporan keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh sejauh mana sistem pengendalian intern dijalankan secara efektif. Temuan lapangan menunjukkan bahwa SPI memainkan peran penting dalam menjaga integritas dan keandalan laporan, namun penerapannya masih menghadapi tantangan serius, khususnya dalam hal kapasitas sumber daya manusia yang terbatas. Banyak pejabat daerah menyampaikan bahwa tanpa pelatihan yang memadai dan dukungan manajerial yang kuat, sistem pengendalian intern hanya menjadi formalitas administratif tanpa memberikan dampak nyata terhadap perbaikan pelaporan.

Di sisi lain, sistem informasi akuntansi yang sejatinya dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan belum menunjukkan pengaruh signifikan dalam konteks Kecamatan Kota Barat. Kendala teknis, seperti keterbatasan infrastruktur dan rendahnya literasi teknologi dari penggunaannya, menyebabkan potensi dari sistem ini belum tergalai optimal. Keberadaan sistem informasi yang belum terintegrasi dengan baik dan tidak responsif terhadap kebutuhan operasional memperburuk ketertinggalan kualitas pelaporan keuangan, sehingga memerlukan langkah pembenahan baik dari sisi teknis maupun manajerial.

Pengawasan keuangan menjadi faktor ketiga yang menunjukkan pengaruh kuat terhadap kualitas laporan keuangan. Baik pengawasan internal maupun eksternal dinilai berperan besar dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah. Namun demikian, muncul kebutuhan untuk memperbaiki pola komunikasi antara auditor dan pejabat daerah, agar proses audit tidak hanya menghasilkan temuan, tetapi juga membangun mekanisme pembelajaran dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini mendorong penguatan sistem pelatihan, pembaruan sistem informasi, dan penciptaan forum dialogis antara pemerintah daerah dan lembaga pengawas sebagai langkah strategis untuk membangun tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan terpercaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, T. M., & Tut, G. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem. *E-Jurnal Akuntansi*, 23(2), 1253–1276.
- Akibun, F., Gintulangi, S. O., & Arifin, R. (2024). Pembinaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Desa Talango Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi. *Jurnal Pengabdian Awara (JPA)*, 1(1), 7–14.
- Akibun, F., Lestari, B. W., Meilandri, D., Kaluku, M. R. A., & Ridhayanto, M. (2024). The Influence Of Leadership Style On Financial Performance With Good Corporate Governance

- As A Moderating Variable. *JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA*, 8(3).
- Akibun, F., Prayitno, H., & Otto, N. (2025). Financial Literacy In Gen Z Generation (Case Study at Bina Taruna University Gorontalo). *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 8.
- Amin, A., & Anwar, A. (2020). Dimensi Karakteristik Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Akuntansi*, 10(3), 223–230.
- Antoni, E., & Indonesia, B. P. K. R. (2014). *Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Survey Pada Pemerintah Kabijpaten Di Seluruh Jawa Barat*. Profita.
- BPK RI. (2019). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2019*.
- Creswell, J. W. (2012). *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*.
- Gunawan, I. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik*. Bumi Aksara.
- Lestari, N. L. W. T., & Dewi, N. N. S. R. T. (2020). Pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(2), 170–178.
- Mawuntu, N. S., Manossoh, H., & Afandi, D. (2020). Pengaruh Kepatuhan Dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara). *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 260–268.
- Patongai, W., Palampanga, A., & Yusnita, N. (2018). Pengaruh kualitas data input, tingkat pemahaman dan tingkat pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan (Studi pada SKPD di Kabupaten Tolitoli). *E Jurnal Katalogis*, 6(2), 86–97.
- Pujiswara, I. B., Herawati, N. T., AK, S. E., & SINARWATI, N. I. K. (2014). Pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan dan akuntabilitas pemerintah daerah (Studi pada satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Klungkung). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 2(1).
- Pura, R. (2017). Effects of Auditor Competence, Information Technology, Accounting Information Systems and Organizational Commitment on Auditors' Performance at The State Audit Agency, In South Sulawesi. *Sci. Res. J*, 5, 16–22.
- Pura, R., & Saat, S. (2013). *Pengantar Akuntansi: Pendekatan Siklus Akuntansi*.
- Riduwan, M. B. A. (2010). Metode dan teknik menyusun tesis. *Bandung: Alfabeta*.
- Rifandi, M. (2018). Pengaruh Teknologi Informasi Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Relasi: Jurnal Ekonomi*, 14(2), 48–61.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Surastiani, D. P., & Handayani, B. D. (2015). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 7(2), 139–149.
- Tuanakotta, T. M. (2013). Audit berbasis ISA (international standards on auditing). *Jakarta: Salemba Empat*, 55, 166–175.
- Ulum, I., & Sofyani, H. (2008). Akuntansi sektor publik. *Universitas Muhammadiyah Malang Press. Malang*.
- Yanti, N. S., & Made, A. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas
- Fitria Akibun, Cs: Pengaruh SPI, SIA, dan Pengawasan Keuangan Page. 29

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1).